BAB II

KAJIAN TENTANG SKETSA INTELEKTUAL DAN BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID

A. Latar Belakang Keluarga

Abdurrahman "Addakhil", demikian nama lengkapnya. Secara leksikal, "Addakhil" berarti "Sang Penakluk", sebuah nama yang diambil Wahid Hasyim, orang tuanya, dari seorang perintis Dinasti Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol.[1] Belakangan kata "Addakhil" tidak cukup dikenal dan diganti nama "Wahid", menjadi Abdurrahman Wahid. Dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti "abang" atau "mas".[2]

Abdurrahman wahid adalah putra pertama dari enam bersaudara[3] yang dilahirkan di Denanyar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Secara genetik Abdurrahman Wahid adalah keturunan "darah biru".[4] Abdurrahman Wahid memang di lahirkan pada hari keempat bulan kedelapan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tanggal itu adalah menurut kalender Islam, yakni bahwa Abdurrahman Wahid dilahirkan pada bulan Sya'ban, bulan ke

[1] Muhammad Rifai, *Gus Dur: Biografi Singkat 1940*-2009, (Jogjakarta: Garasi House of Book, 2012), Cet. Ke-3, h. 27.

[2] Muhammad Zakki, *Gus Dur Presiden Akhirat* , (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2010), h. 1.

[3] Enam bersaudara itu adalah Abdurrahman Wahid (1940), Aishah (1941), Salahuddin (1942), Ummar (1944), Chodijah (1948), Hasyim (1953).

[4] Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 4.

delapan dalam penanggalan Islam. Sebenarnya tanggal 4 Sya'ban 1940 adalah tanggal 7 September 1940.[5] Ayah Abdurrahman Wahid, Wahid Hasyim, Di lahirkan di Tebu Ireng, Jombang pada bulan Juni 1914. Ia adalah putra pertama dan anak kelima dari sepuluh bersaudara dan ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri pondok pesantren Denanyar Jombang.[6]

Kakek Abdurrahman Wahid dari pihak ayahnya adalah K. H. Hasyim Asy'ari, pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama' (NU) dan pendiri pesantren Tebuireng Jombang. K. H. Hasyim Asy'ari dilahirkan di Jombang pada bulan Februari 1871 dan wafat di Jombang pada Juli 1947. Ia adalah salah seorang yang mendirikan NU pada tahun 1926 dan sangat dihormati sebagai seorang pemimpin Islam dalam masyarakat pedesaan yang tradisional. Ia juga dikenal sebagai seorang guru yang banyak mamberi inspirasi serta seorang terpelajar. Namun, ia juga seorang nasionalis yang teguh pendirian. Banyak dari teman-temannya merupakan tokoh-tokoh terkemuka gerakan nasionalis pada periode sebelum perang.[7]

Lalu kakek Abdurrahman Wahid dari pihak Ibu, Kiai Bisri Syansuri. Kiai Bisri Syansuri dilahirkan pada bulan september 1816 di daerah pesisir sebelah utara Jawa Tengah, sebuah daerah yang mempunyai banyak pesantren. Bersama dengan Hasyim Asy'ari, ia dianggap sebagai salah seorang tokoh kunci bagi

---

[5] Greg Barton, *Biografi Gusdur The authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LKis, 2002), h. 25.

[6] M. Hamid, *Gus Gerr*, (Pustaka Marwa: Yogyakarta, 2010), h. 14.

[7] Greg Barton, *Biografi Gusdur The authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*, h. 26-27.

didirikannya NU. Pada tahun 1917, ia memperkenalkan pada dunia pesantren, kelas pertama bagi santri puteri di Pesantrennya yang baru di dirikan di Desa Denanyar, yang terletak diluar Jombang. Bisri Syansuri mengambil sebidang tanah yang luas, dan benar-benar tandus. Setelah beberapa lama tanah itu berubah menjadi komunitas yang makmur dalam pengembangan pertanian, pembelajaran, dan keruhanian. Bisri Syansuri telah membuktikan dirinya bukan sekedar seorang ahli fiqh, atau Yurisprudensi Islam, dan seorang administratur pendidikan yang berbakat, melainkan juga seorang ahli pertanian yang cakap. Pesantrennya di Denanyar terkenal oleh karena pendekatan yang teratur dan berdisiplin terhadap keilmuan dan kehidupan bersama.[8]

Dengan demikian, Abdurrahman Wahid merupakan cucu dari ulama' NU, yaitu KH. Hasyim Asy'ari, pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama' (NU) dan KH. Bisri Syansuri merupakan tokoh NU, yang pernah menjadi Rais 'aam PBNU, dan sekaligus dua tokoh tersebut adalah tokoh bangsa Indonesia.

Abdurrahman Wahid wafat pada hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Monokusumo, Jakarta, pukul 18.45 WIB akibat komplikasi penyakit yang diderita sejak lama. Sebelum wafat Abdurrahman Wahid menjalani *hemodialisis* (cuci darah) rutin. Abdurrahman Wahid di makamkan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur.[9]

---

[8] *Ibid.,* h. 28-29.
[9] Muhammad Rifa'i, *Gus Dur,* (Jogjakarta : Garasi House of Book, 2010), h. 48.

B. Latar Belakang Pendidikan

Masa kanak-kanak Abdurrahman Wahid dihabiskan dalam lingkungan pesantren milik kakeknya Hasyim Asy'ari (pendiri pondok pesantren Tebuireng) dan Kiai Bisri Syansuri (pendiri pondok pesantren Denanyar). Berkat bimbingan ibunya, Abdurrahman Wahid pada usia 4 tahun telah mampu membaca al Qur'an beserta ilmu tajwidnya dan ditambah lagi dengan kehidupan pesantren yang terbiasa dengan kitab-kitab kuning yang berbahasa arab tanpa sakal dan arti Indonesia maupun Jawa. Kemudian di usia 4 tahun, Abdurrahman Wahid tinggal bersama ayahnya di Menteng Jakarta Pusat, ketika itu Wahid Hasyim dipercaya mengepalai Shumubu, semacam kantor ustusan agama atas permintaan pemerintah Jepang.[10]

Pada tahun 1949, ketika *clash* dengan pemerintahan Belanda telah berakhir, ayahnya diangkat sebagai Menteri Agama pertama, sehingga keluarga Wahid Hasyim pindah ke Jakarta. Dengan demikian suasana baru telah dimasukinya. Tamu-tamu, yang terdiri dari para tokoh-dengan berbagai bidang profesi-yang sebelumnya telah dijumpai di rumah kakeknya, terus berlanjut ketika ayahnya menjadi Menteri agama. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi seorang anak bernama Abdurrahman Wahid. Secara tidak langsung, Abdurrahman Wahid juga mulai berkenalan dengan dunia politik yang didengar dari kolega ayahnya yang sering mangkal di rumahnya.[11]

---

[10] Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, h. 34.
[11] *Ibid.*, h. 29.

Walaupun Ayahnya seorang menteri dan terkenal di kalangan pemerintahan Jakarta, Abdurrahman Wahid tidak pernah bersekolah di sekolah-sekolah elit yang biasanya dimasuki oleh anak-anak pejabat pemerintah. Ayahnya pernah menawarinya untuk masuk ke sekolah elit, tetapi Abdurrahman Wahid lebih menyukai sekolah-sekolah biasa. Katanya, sekolah-sekolah elit membuatnya tidak betah. Abdurrahman Wahid memulai pendidikan sekolah dasarnya di sekolah dasar KRIS di Jakarta pusat. Ia mengikuti pelajaran di kelas tiga dan kemudian di kelas empat di sekolah ini tetapi kemudian ia pindah ke sekolah dasar Matraman Perwari, yang terletak dekat dengan rumah keluarga mereka yang baru di Matraman, Jakarta Pusat.

Dalam waktu yang pendek, Abdurrahman Wahid tidak terlihat sebagai siswa yang cemerlang. Pada tahun 1954, setahun setelah ia menamatkan sekolah dasar dan mulai sekolah menengah ekonomi pertama (SMEP), ia terpaksa mengulang kelas satu karena gagal dalam ujian. Kegagalan ini jelas disebabkan oleh seringnya ia menonton pertandingan sepak bola sehingga ia tak mempunyai cukup waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah.[12]

Pada tahun 1954 juga sang Ibu berjuang sendirian untuk membesarkan enam anak, sedangkan Abdurrahman Wahid sendiri kurang berhasil dalam pelajaran sekolahnya, ia dikirim ke Yogyakarta untuk melanjutkan pelajarannya di SMEP. Ketika di kota ini, ia berdiam di rumah salah seorang teman Ayahnya, Kia Haji Junaidi. Yang menarik adalah bahwa Kiai Junaidi adalah salah seorang

[12] *Ibid.*, h. 49.

sejumlah kecil ulama' yang terlibat dalam gerakan Muhammadiyah pada periode itu. Ia anggota Majlis Tarjih atau Dewan Penasehat Agama Muhammadiyah.[13]

Hal ini mungkin biasa-biasa saja, tetapi saat itu, dan bahkan dalam beberapa dasawarasa kemudian, secara relatif hampir tidak terdapat pertautan antara kaum modernis Muhammadiyah dan kaum tradisional NU. Sebagaimana NU dulu dan sekarang, merupakan organisasi Ulama' yang mewakili Islam tradisional di Indonesia, hampir semua kaum Modernis tergabung dalam Muhammadiyah.[14]

Untuk melengkapi pendidikan Abdurrahman Wahid maka diaturlah agar ia dapat pergi kepesantren Al-Munawwir di Krapyak tiga kali seminggu. Pesantren ini terletak diluar sedikit Kota Yogyakarta. Disini ia belajar bahasa Arab dengan Kiai Haji Ali Maksum. Ketika tamat sekolah menengah ekonomi pertama (SMEP) di Yogyakarta pada tahun 1957, Abdurrahman Wahid mulai mengikuti pelajaran di Pesantren secara penuh. Ia bergabung dengan pesantren di Tegal Rejo Magelang, yang terletak disebelah utara Yogyakarta, ia tinggal disini hingga pertengahan 1959. disini ia belajar pada Kiai Khudhori, yang merupakan salah satu dari pemuka NU. Pada saat yang sama ia juga belajar paruh waktu di Pesantren Denanyar di Jombang dibawah bimbingan Kakeknya dari pihak Ibu, Kia Bisri Syansuri.[15]

---

[13] *Ibid.*, h. 49.
[14] *Ibid.*, h. 50.
[15] *Ibid.*, h. 52.

Pada tahun 1959 ia pindah ke Jombang untuk belajar secara penuh di Pesantren Tambakberas dibawah bimbingan Kiai Wahab Chasbullah. Ia belajar disini hingga tahun 1963 dan selama kurun waktu itu ia selalu berhubungan dengan Kiai Bisri Syansuri secara teratur. Selama tahun pertamanya di Tambakberas, ia mendapat dorongan untuk mulai mengajar. Ia kemudian mengajar di Madrasah modern yang didirikan dalam komplek pesantren dan juga menjadi kepala sekolahnya. Selama masa ini ia tetap berkunjung ke Krapyak secara teratur. Disini ia tinggal di rumah Kiai Ali Maksum. Pada masa inilah sejak akhir tahun 1950-an hingga 1963 Abdurrahman Wahid mengalami konsolidasi dalam studi formalnya tentang Islam dan sastra Arab klasik.[16]

Tahun 1964, Abdurrahman Wahid berangkat ke Kairo untuk belajar di Universitas Al-Azhar. Namun sebagian besar waktunya di Mesir dihabiskan di ruang perpustakaan, terutama *American University Library*, sebuah perpustakaan terlengkap di kota itu. Dari Mesir ia pindah ke Universitas Bagdhad mengambil fakultas sastra.[17] Tidak terlalu jelas, apakah Abdurrahman Wahid menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar kesarjanaannya di Bagdhad. Karena sebagain orang menganggapnya selesai dan memperoleh gelar LC. Namun sebagain yang lain menyatakan "tidak memperoleh gelar" atau "tidak selesai". Namun yang pasti, usai di Bagdhad, Abdurrahman Wahid ingin menguyam dunia pendidikan liberal Eropa.

---

[16] *Ibid.*, h. 53.
[17] Fuad Anwar, *Melawan Gus Dur*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), h. 119-120.

Pada tahun1971, ia menjajaki salah satu di Universitas Eropa untuk melanjutkan pendidikannya disana. Akan tetapi, harapannya tidak kesampaian karena kualifikasi- kualifikasi mahasiswa dari Timur Tengah tidak diakui Universitas-Universitas di Eropa. Selanjutnya, yang memotivasi Abdurrahman Wahid untuk pergi ke MC Gill University Kanada untuk mempelajari kajian-kajian ke Islaman secara mendalam. Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah terilhami berita-berita menarik sekitar perkembangan dunia pesantren.[18]

Sekembalinya di Indonesia, ia kembali ke habitatnya semula yakni dunia pesantren. Dari tahun 1972 hingga 1974, ia di percaya menjadi dosen disamping Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. [19] Kemudian tahun 1974 sampai 1980 oleh pamannya, K. H. Yusuf Hasyim, di beri amanat untuk menjadi sekretaris umum Pesantren Tebuireng, Jombang. Selama periode ini ia secara teratur mulai terlibat dalam kepengurusan NU dengan menjabat Katib awal Syuriah PBNU sejak tahun 1979.[20]

C. Aktifitas Sosial Keagamaan dan Politik

Dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan perkenalannya dengan keilmuan yang cukup kosmopolitan, Abdurrahman Wahid mulai muncul ke permukaan percaturan intelektual Indonesia dengan pemikiran-pemikiran

---

[18] Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 57-58.

[19] Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dus dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 9.

[20] Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, h. 58.

briliannya pada tahun 1970-an, ketika ia mulai aktif di beberapa lembaga sosial, LSM dan forum-forum diskusi. Kendati latar belakang pendidikan formalnya tidak ada yang ditempuh di Barat, menurut Greg Barton,[21] ia secara intelektual jauh lebih siap untuk berpartisipasi dalam wacana-wacana besar mengenai pemikiran Barat, pendidikan Islam dan masyarakat muslim. Yang kesemuanya ini tentunya menjadi modal awal sehingga tidak ketinggalan jauh dari intelektual muslim yang ada. Studinya di Baghdad telah memberikan dasar-dasar yang baik mengenai pendidikan bercorak liberal dan bergaya Barat serta sekuler.

Dengan gaya pemikiran yang liberal inilah, oleh banyak kalangan Kiai dipandang sesuatu yang riskan. Dalam satu kesempatan Abdurrahman Wahid pernah melontarkan gagasan yang terbilang *nyleneh*. Katakanlah seperti; mengganti assalamu'alaikum menjadi selamat pagi, sore atau malam; menjadi juri Festifal Film Indonesia (FFI); membuka malam puisi Jesus Kristus di gereja; sebagai Dewan Kesenian Jakarta; menjadi MPR fraksi FKP; kedekatannya dengan kelompok-kelompok minoritas, khususnya Nashrani; menolak bergabung dengan ICMI, dikala sebagian besar umat Islam mendambakan kehadirannya; termasuk keterlibatannya sebagai ketua di Forum Demokrasi (Fordem); dan beberapa jabatan serta aktivitas sosial lain yang ketika itu masih dianggap tabu oleh kaum santri (NU).[22]

[21] Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dus dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, h. 107.
[22] *Ibid.*, h. 107.

Bukan hanya itu, dalam konteks pergulatan politik di tingkat elit, Abdurrahman Wahid juga terbilang kontroversi dan vokal. Bahkan tidak jarang ia melakukan mistifikasi dalam setiap kebijakan politik. Sehingga persoalan yang ia bawakan terkesan misterius, adikodrati dan samar-samar.[23] Oleh karena itu tidak heran jika dalam perjalanannya ia mendapat banyak tantangan.

Karena loyalitas dan sikap pemikirannya yang progresif dan inklusif, ia dijadikan salah seorang fungsionaris di LP3ES. Dan mulai saat itulah Abdurrahman Wahid tinggal di Jakarta bekerja di LP3ES dan bergaul luas dengan para aktifis LSM, baik dari Jakarta maupun dari luar negeri. Meski demikian kegiatan di dunia pesantren tidak ditinggalkan, yakni dengan mendirikan pesantren Ciganjur, Jakarta selatan.[24]

Kepindahannya di Jakarta dan kiprahnya di dunia LSM, ia banyak berbaur dan berkenalan dengan tokoh-tokoh maupun kelompok yang berlatar belakang berbeda-beda. Semenjak itu pula ia banyak bertukar pikiran dengan kalangan kader intelektual muda yang progresif seperti Nurcholis Madjid dan Djohan Effendy, melalui forum akademik maupun lingkaran kelompok studi. Dan selanjutnya dari tahun 1980-1990 ia ikut berhidmad di MUI (Majelis Ulama Indonesia).[25]

Pada 1984, Abdurrahman Wahid dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim *ahl hall wa al-'aqdi* yang diketuai K.H. As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki

[23] Khoirul Rosyadi, *Mistik Politik Gus Dur*, (Yogyakarta: Jendela, 2004), h. 174.
[24] Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, h. 58.
[25] *Ibid.*, h. 59.

jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada muktamar ke-28 di Pesantren Krapyak, Yogyakarta (1989) dan muktamar di Cipasung, Jawa Barat (1994).[26]

Dengan segala kapasitas kemampuannya, serta kegigihan dalam berusaha untuk terus mengembangkan organisasi NU ini baik dalam segi kualitas maupun kuantitas, serta kapabelitas intelektualnya yang memadai, ia kemudian mendapat banyak dukungan dan rasa simpatik dari warga Nahdliyin. Oleh karena itu, Abdurrahman Wahid dapat menduduki jabatan ketua umum PBNU pada Muktamar ke-29 di Cipasung (1994) untuk periode yang ketiga.[27] Selanjutnya ia juga sebagai deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Ciganjur, Jakarta selatan, 23 Juli 1998,[28] dengan ketua umumnya dipegang ia sendiri. Dan ia pun pernah menjabat Presiden RI selama kurang lebih dua tahun (1999-2001).

Sisi-sisi menarik dari progresivitas dan liberalisme pemikiran Abdurrahman Wahid secara pribadi dan perubahan secara signifikan yang terjadi dalam tubuh NU selama kepemimpinannya sebagai sisi yang lain, kemudian banyak menjadi sorotan dan banyak didiskusikan dan menjadi sumber analisis dan penelitian yang dilakukan oleh pengamat dari dalam maupun luar negeri. Beberapa desertasi, tesis, buku, dan paper telah ditulis untuk keperluan ini.[29]

---

[26] Faisol, *Gus Dur dan Pendidikan Islam: Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 73.

[27] Zainal Arifin Thoha, *Kenyelenehan Gus Dur Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 84.

[28] Asmawi, *PKB Jendela politik Gus Dur*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999), h. 29

[29] Khoirul Rosyadi, *Mistik Politik Gus Dur*, h. 121.

1. Penghargaan yang Diperoleh Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid merupakan satu-satunya pemimpin NU yang diakui dunia, baik wawasan keilmuannya, kepeduliannya kepada masalah demokrasi dan toleransi. Serta besarnya pengaruh politik yang dimilikinya.

a. Pada tahun 1993, Abdurrahman Wahid menerima penghargaan Ramon Magsay Award, sebuah "Nobel Asia" dari pemerintah Filipina. Penghargaan ini diberikan karena Abdurrahman Wahid dinilai berhasil membangun landasan yang kokoh bagi toleransi umat beragama, pembangun ekonomi yang adil, dan tegaknya domokrasi di Indonesia.
b. Pada akhir tahun 1994, Abdurrahman Wahid juga terpilih sebagai salah satu seorang presiden WCRP (*Werld Council for Religion and Peace* atau Dewan Dunia untuk Agama dan Perdamaian).
c. Pada tahun 1996 dan 1997, majalah *Asiaweek* memasukkan. Abdurrahman Wahid dalam daftar orang terkuat di Asia. Abdurrahman Wahid menjadi pemimpin besar dan diakui karena pemikirannya dan gerakan sosial yang dibangunnya mempunyai dampak yang kuat terhadap demokrasi, keadilan, dan toleransi keagamaan di Indonesia.
d. Ia mendapat penghargaan dari Simon Wiethemthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan HAM di Israel, karena dianggap sebagai salah satu tokoh yang peduli dalam persoalan HAM.[30]

[30] M. Hanif Dhakiri, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 43-44.

e. Ia disebut sebagai "Bapak Pluralisme" oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang Di Klenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok pada tanggal 10 Maret 2004.

f. Pada tanggal 11 Agustus 2006, GadisArivia dan Abdurrahman Wahid mendapat tasrif Award-AJI sebagai pejuang kebebasan Pers 2006. Abdurrhman Wahid dan Gadis dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak, semangat keberagamaan, dan demokrasi di Indonesia.

g. Abdurrahman Wahid memperoleh penghargaan dari Mebel Valor yang berkantor di Los Angeles karena Abdurrahman Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas.

h. Ia juga memperoleh penghargaan dari universitas Temple dan namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Studies.[31]

Dari beberapa penghargaan yang diperoleh Abdurrahman Wahid di atas yang diraihnya di dalam maupun di luar negeri menunjukkan bahwa kapasitas beliau sebagai seorang cendekiawan, aktivis kemanusiaan, dan tokoh pro demokrasi tidak dapat diragukan lagi.

2. Gelar yang Diperoleh Abdurrahman Wahid

[31] Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, h. 32-33.

Selain itu, KH. Abdurrahman Wahid memperoleh banyak gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Cause) dari beberapa Perguruan Tinggi ternama di berbagai negara antara lain:

a. Doktor Kehormatan bidang hukum dari Netanya University, Israel (2003)
b. Doktor Kehormatan bidang hukum dari Konkuk University, Seoul, Korea Selatan (2003)
c. Doktor Kehormatan dari Sun Moon University, Seoul, Korea Selatan (2003)
d. Doktor Kehormatan dari Soka Gakkai University, Tokyo, Jepang (2002)
e. Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Thammasat University, Bangkok, Thailand (2000)
f. Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Soeborne University, Paris, Perancis (2000)
g. Doktor Kehormatan dari Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (2000)
h. Doktor Kehormatan dari Twente University, Belanda (2000)
i. Doktor Kehormatan dari Jawaharlal Nehru University, India (2000)[32]

[32] M. Hanif Dhakiri, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, h. 45.

D. Karya-karya Intelektual Abdurrahman Wahid

Keistimewaan yang luar biasa dalam diri Abdurrahman Wahid yaitu bahwa beliau seorang pengarang dan ahli pikir Islam yang dalam ilmunya dan mempunyai nafas panjang dalam karya-karyanya. Karya-karya tulis yang ditinggalkannya menunjukkan sebagai seorang pengarang yang sangat produktif.

Abdurrahman Wahid secara kelembagaan tidak pernah mendapatkan ijazah kesarjanaan namun Ia seorang yang cerdas, progresif dan cemerlang ide-idenya. Tetapi Ia telah membuktikan bahwa Ia adalah seorang yang cerdas lewat idenya yang cemerlang dan kepiaweannya dalam berbahasa dan retorika serta tulisan-tulusannya di berbagai media massa, majalah, esai, dan kegiatan-kegiatan seminar, sarasehan serta buku-buku[33] yang telah diterbitkan antara lain :

1. Bunga Rampai Pesantren (Jakarta: Darma Bhakti, 1978)
2. Muslim di Tengah Pergumulan (Jakarta: Leppenas, 1981)
3. Kiai Menggugat Gus Dur Menjawab, Sebuah Pergumulan Wacana dan Transformasi (Jakarta: Fatma Press, 1989)
4. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (Yogyakarta: LkiS, 1997)
5. Tabayyun Gus Dur (Yogyakarta: LkiS, 1998)
6. Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: Lkis, 1999)
7. Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur (Jakarta: Erlangga, 1999)

[33] Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 126.

8. Gus Dur Menjawab Tantangan Perubahan Zaman (Jakarta: Kompas, 1999)
9. Membangun Demokrasi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999)
10. Mengurai Hubungan Agama dan Negara (Jakarta: Grasindo, 1999)
11. Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2010)
12. Melawan Melalui Lelucon (Jakarta: Tempo, 2000)
13. Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Desantara, 2001)
14. Menggerakkan Tradisi (Yogyakarta: LKiS, 2010)
15. Islamku, Islam Anda, Islam Kita (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)
16. Islam Kosmopolitan (The Wahid Institute, 2007)[34]

Dari berbagai tulisannya baik buku, makalah, dan esai-esai kompas tahun 90-an menunjukkan tingkat intelektualnya. Dengan bahasa yang sederhana dan lancar, bahkan dalam penyampaian lisan pun, Abdurrahman Wahid diakui sangat komunikatif. Sebagaimana dikatakan Greg Barton meskipun Abdurrahman Wahid mengenyam pendidikan, tidak memiliki gelar kesarjanaan Barat, namun berbagai tulisannya menunjukkan Ia seorang intelektual progresif dan jarang sekali dijumpai *foot note* dalam berbagai tulisannya. Hal ini dikarenakan kemampuannya yang luar biasa dalam memahami karya-karya besar tokoh-tokoh dunia (pemikir dunia seperti: Plato, Aristoteles, Karl Max, Lenin, Max Weber, Snouck Hugronje, Racliffe Brown, dan Milinowski). Selanjutnya karya-karya

[34] Tim Incres, *Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 257.

tersebut dieksplorasi secara kritis dan dikolaborasikan dengan pemikiran-pemikiran intelektual Islam dalam memunculkan ide-ide pemikirannya.[35]

E. Pemikiran Abdurrahman Wahid

1. Pribumisasi Islam

Gagasan pribumisasi Islam, secara geneologis dilontarkan pertama kali oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1980-an. Menurut Abdurrahman Wahid Pribumisai Islam adalah rekonsilasi antar budaya dan agama. Rekonsilasi ini menutut umat islam memahami wahyu dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya.[36]

Proses pertumbuhan Islam sejak nabi Muhammad, sahabat, para ulama-tidak serta merta menolak semua tradisi pra-Islam (dalam hal ini budaya masyarakat arab pra-Islam). Tidak seluruh sistem lokal ditolak Islam, tradisi dan adat setempat yang tidak bertentangan secara diametral dengan Islam dapat diinternalisasikan menjadi ciri khas dari fenomena Islam di tempat tertentu.[37] Demikian juga proses pertumbuhan Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari budaya dan tradisi masyarakat.

Agama dan budaya bagiakan uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Agama (Islam) bersumberkan wahyu yang bersifat normatif, maka cenderung

---

[35] Greg Barton, "Memahami Abdurrahman Wahid", dalam pengantar *Prisma Pemikiran Gus Dur*, h. xxvi

[36] Zubaidi, *Islam dan Benturan Antar Peradaban*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007) h. 181

[37] Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dus dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, h. 141.

menjadi permanen. Sedangkan budaya merupakan ciptaan manusia, oleh sebab itu perkembangannya mengikuti zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya.[38] Lebih lanjut Abdurrahman Wahid mengatakan:

> "Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terusmenerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang. Kekayaan variasi budaya memungkinkan adanya persambungan antar berbagai kelompok atas dasar persamaan. Upaya rekonsiliasi antara budaya dan agama bukan karena kekhawatiran terjadinya ketegangan antara keduanya, sebab kalau manusia dibiarkan pada fitroh rasionalnya, ketegangan seperti itu akan reda dengan sendirinya. Sebagai contoh redanya semangat Ulama dalam mempersoalakan rambut gondrong".[39]

Pribumusasi Islam bukanlah"jawanisasi", sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa merubah hukum itu sendiri. Juga bukannya upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman *nash*, dengan tetap memberikan peranan kepada ushul fiqh dan qaidah fiqh.[40]

Pribumisasi Islam dalam segi kehidupan bangsa merupakan suatu ide yang perlu dicermati. Selanjutnya, Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa

---

[38] Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001), h. 117.

[39] *Ibid.*, h. 118.

[40] Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Sholeh, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989), h. 83.

pribumisasi bukan merupakan suatu upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti dari pribumusasi Islam adalah kebutuhan untuk menghindari polarisi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan.[41]

Gagasan Abdurrahman Wahid ini tampak ingin memperlihatkan Islam sebagai sebuah agama yang apresiatif terhadap konteks-konteks lokal dengan tetap menjaga pada realitas *pluralisme* kebudayaan yang ada. Abdurrahman Wahid dengan tegas menolak "satu Islam" dalam ekspresi kebudayaan misalnya semua simbol atau identitas harus menggunakan ekspresi kebudayaan Arab. Penyeragaman yang terjadi bukan hanya akan mematikan kreativitas kebudayaan umat tetapi juga membuat Islam teralienasi dari arus utama kebudayaan nasional. Bahaya dari proses arabisasi adalah tercerabutnya kita dari akar budaya kita sendiri.[42]

> "Kemampuan orang Islam untuk memahami masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa, dan bukan berusaha memaksakan agendanya sendiri. Kalau ini terjadi, maka yang berlangsung sebenarnya hanyalah proses pelarian (*eskapisme*). Umat Islam terlalu menuntut syarat-syarat yang terlalu idealistik untuk menjadi muslim yang baik. ….kecenderungan formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan Islamisasi dalam bentuk manifestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan karena hanya menimbulkan kekeringan subtitusi"[43]

[41] Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan,* h. 119.
[42] Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dus dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, h. 140.
[43] Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan,* h. 130.

Bahkan Abdurrahman Wahid menolak adanya pencampuradukkan kebudayaan baik oleh kalangan agama maupun kalangan birokrasi karena kebudayaan sangat luas cakupannya yaitu kehidupan sosial manusia (*human social life*) itu sendiri. Birokkratisasi[44]kebudayan yang dilakukan akan menimbulkan kemandekan kreatifitas suatu bangsa. Kebudayaan sebuah bangsa pada hakekatnya adalah kenyataan *pluralistic*, pola kehidupan yang diseragamkan atau dengan kata lain sentralisasi adalah sesuatu yang sebenarnya tidak berbudaya.

Yang menjadi pertanyaan sekarang mampukah Islam tetap eksis dalam zaman yang serba modern ataukah Islam tengelam dalam mimpi atas kejayaan para pemikir terdahulu? Sebagai pemeluk agama yang baik dalam lingkup wawasan kebangsaan, menurut Abdurrahman Wahid yaitu: selalu mengutamakan pencarian cara-cara yang mampu menjawab tantangan zaman dan lokalitas kehidupan tanpa meninggalkan inti ajaran agama. Selalu ada upaya untuk melakukan reaktualisasi ajaran agama dalam situasi kehidupan yang konkrit, tidak hanya dicukupkan dengan visualisasi yang abstrak belaka. Dalam bahasa lain agama berfungsi sebagai wahana pengayom

[44] Kongres kebudayaan yang diprakarsasi oleh departemen pendidikan dan kebudayaan menunjukan adanya campur tangan birokrasi pemerintah terhadap originalitas kebudayaan itu sendiri. Budaya sebagai hasil kreatifitas pemikiran manusia sebaikanya dibiarkan berkembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, h. 5-9.

tradisi bangsa, sedangkan pada saat yang sama agama menjadikan kehidupan berbangsa sebagai wahana pematangan dirinya.[45]

Pribumisasi Islam merupakan upaya dakwah (pola *amar ma'ruf nahi mungkar* diselaraskan dengan konsep *mabadi khoiro ummah*). Pelaksanaan kongkritnya adalah menasionalisasikan perjuangan Islam, dengan harapan tak ada lagi kesenjangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan Islam.33 Islam sebagai agama yang diakui di Indonesia selain agama-agama yang lain diaktualisasikan sebagai inspirasi spiritual bagi tingkah laku kehidupan seorang atau kelompok dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang dibutuhkan umat Islam Indonesia adalah menyatukan *"aspirasi Islam"* menjadi *"aspirasi nasional"*.[46]

> "Salah satu wajah ketegangan adalah upaya untuk menundukkan kebudayaan kepada agama melalui proses pemberian legitimasi. Legitimasi diberikan bukan sebagai alat penguat, tetapi sebagai alat pengerim. Proses ini berfungsi melakukan penyaringan terhadap hal-hal yang dipandang sesuai atau bertentangan dengan aturanaturan agama."[47]

Bagi Abdurrahman Wahid agama Islam adalah sumber inspirasi, wacana pribumisasi Islam sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni arabisasi. Mainstream pemikiran Abdurrahman Wahid tentang gagasan itu adalah bagaimana Islam sebagai ajaran normatif yang berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa

---

[45] *Ibid.*, h. 4.

[46] Zainal Arifin Thoha, *Kenyelenehan Gus Dur Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*, h. 207.

[47] Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan,* h. 85.

kehilangan identitas masing-masing. Kata Abdurrahman Wahid, "arabisasi atau proses mengidentifikasi diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercabutnya dari akar budaya kita sendiri. Lebih dari itu, arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan". Islam menjadi akomodatif tanpa meremehkan kebudayaan lokal. Abdurrahman Wahid ingin mencoba melepaskan paket ajaran Islam yang sampai ke Indonesia dari unsur lokal Arab, untuk diganti menjadi lokal Indonesia.[48]

Namun, sekali lagi harus ada upaya yang lebih operasional dari para penggagas pribumisasi Islam untuk memberikan koridor mana ajaran Islam yang substantif dan mana yang bersifat teknis-instrumen. Meskipun di sana ada perdebatan, tapi setidaknya ada upaya ijtihad yang serius dan bertanggung jawab secara akademik. Saya melihat bahwa gagasan tentang pentingnya pribumisasi Islam dalam kontek lokal ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan, karena dengan demikian Muslim Indonesia dapat tetap mempertahankan identitas ke-Indonesia-annya yang khas, dan pada saat yang sama dapat mengejawentahkan nilai-nilai Islam dalam praktik kehidupannya. Salah satu ciri masyarakat Indonesia yang sopan dan ramah dapat menjadi modal berharga terhadap konsep toleransi yang semakin lama semakin tidak "terngiang" lagi. Pribumisasi bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya tidak hilang. Inti pribumisasi adalah kebutuhan, bukan

[48] Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, h. 143.

untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi memang tak terhindarkan.[49]

2. Pluralisme

Pluralisme berasal dari kata "plural" yang berarti sesuatu atau bentuk yang lebih dari satu. Secara bahasa, istilah ini memiliki pengertian, antara lain: keberadaan sejumlah kelompok orang dalam satu masyarakat yang berasal dari ras, pilihan politik dan kepercayaan agama yang berbeda. Istilah pluralisme sering dipakai beriringan dengan kata pluralitas. Namun pluralitas lebih mengaruh pada realitas keberagaman itu sendiri.

Pluralisme bagi Abdurrahman Wahid adalah sikap kerelaan dalam menerima perbedaan baik yang ada kaitannya dengan agama, suku dan bangsa. Bagi Abdurrahman Wahid perbedaan memang sudah menjadi *sunnatullah* yang tidak boleh dipaksakan. Justru perbedaan akan memberi keindahan hidup supaya saling mengenal dan menyapa. Kosmopolitanisme peradaban Islam itu muncul dalam sejumlah unsur dominan, seperti hilangnya batasan etnis, agama, kuatnya pluralitas budaya dan heterogenitas politik. Kosmopolitanisme itu bahkan menempakan diri dalam unsur dominan yang menakjubkan, yaitu kehidupan beragama yang eklektik selama berabad-abad. Kalau ditelusuri dengan cermat perdebatan sengit di bidang teologi dan hukum agama selama empat abad pertama sejarah Islam, akan nampak secara jelas betapa beragamnya pandangan yang dianut oleh umat

[49] Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Sholeh, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan,* h. 82.

Islam pada waktu itu.[50] Dalam proses perubahan sosial, agama hanya berfungsi suplementar dan hanya menyediakan sarana bagi proses perubahan itu sendiri, bukan agama yang membuat perubahan itu. Dunia itu berkembang menurut perkembangan dunia-nya sendiri.

Kesungguhan mengaitkan agama dengan problem kemanusiaan dari perspektif pluralisme dan multikulturalisme meniscayakan keteguhan penganut agama melepaskan segala fanatisme buta terhadap keyakinan agamanya. Dengan itu, penganut agama terdorong senantiasa mengedepankan sikap toleransi, menghindari aksi kekerasan dan bersikap adil bagi semua sebab kalau ini tidakmencari cermin dalam kehidupan, menurut Abdurrahman Wahid, akan merusak citra Islam itu sendiri sebagai agama yang senantiasa menebarkan prinsip-prinsip *rahmah li al-'amiin.*[51]

Bagi Abdurrahman Wahid, proses kerjasama antar masyarakat dalam menyikapi kehidupan dibangun di atas perangkat nilai-nilai agama dan keyakinan atau nilai-nilai budaya yang menjadi pilihannya sekaligug memandannya dari perspektif kemanusiaan yang universal, bukan memaksakan satu nilai kepada nilai yang lain. Kesungguhan ini menjadi modal tersendiri bagi strategi melestarikan pluralitas bangsa.[52]

---

[50] Budy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 594.

[51]Wasid, *Gus Dur Sang Guru Bangsa: Pergolakan Islam, Kemanusiaan dan Kebangsaan*, (Yogyakarta: Interpena, 2010), h 121.

[52]*Ibid*., h 122-123.

Maka, dalam masyarakat yang beragam budaya, suku dan agama keharusan mengedepankan kesamaan adalah sebuah keniscayaan dari pada selalu mencari perbedaan. Modal ini cukup efektif sehingga nilai-nilai budaya dan agama ditempatkan dalam posisinya sebagai motivasi bagi upaya membangun sebuah pluralitas dan multikultural yang merupakan aset bangsa. Khususnya bagi seorang Muslim harus kembali memaknai Islam sebagai agama yang mampu menebarkan kebebasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Beserta agama lain, Islam harus membuka diri sebab dengan ini, nilai-nilainuniversitas yang dimiliki akan terasa maknanya sepanjang hidup ini.[53]

3. Demokrasi

Ada beberapa alasan mengapa Islam disebut sebagai agama demokrasi: *pertama,* Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas, dari pemegang jabatan tertinggi hingga rakyat jelata dikenakan hukum yang sama. Kalau tidak demikian, maka hukum dalam Islam tidak jalan dalam kehidupan.[54]

Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan. "*Amruhum syuraa bainahum",* artinya perkara-perkara mereka dibicarakan di antara mereka. Dengan demikian, tradisi membahas, tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka pada akhirnya diakhiri dengan

[53] *Ibid*., h 123.

[54] Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur,* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 87.

kesepakatan. *Ketiga,* Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan. Karena dunia ini hakikatnya adalah persiapan untuk kehidupan di akhirat. "*Wa akhiratu khairū wa abqā",* akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Karena itu kehidupan manusia tarafnya tidak boleh tetap, harus terus ada peningkatan untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik di akhirat.[55]

Jadi, standar yang baik itu di akhirat, kehidupan di dunia harus diarahkan kepada yang baik itu. Hal ini sebenarnya adalah prinsip demokrasi, karena demokrasi pada dasarnya adalah upaya bersama-sama untuk memperbaiki kehidupan. Karena itulah Islam dikatakan sebagai agama perbaikan, *diinul islah,* atau agama inovasi.[56]

Abdurrahman Wahid adalah salah satu pemikir negeri ini yang menerima sistem demokrasi, meskipun dalam prakteknya bagi Abdurrahman Wahid, nilai-nilai demokrasi harus tunduk pada nilai-nilai lokalitas yang dimiliki bangsa, bukan sekedar mengekor praktek demokrasi secara utuh yang berkembang di Barat atau di Timur. Artinya, mengambil praktek demokrasi yang positif dari Barat atau mungkin dari Timur sembari bangsa ini meneguhkan keberadaannya sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai religiusitas dan lokalitas sehingga demokrasi di negeri ini harus dikembangkan tanpa menggerus keaslian budaya bangsa.[57]

---

[55] *Ibid*., h. 87-88.
[56] *Ibid*., h. 88.
[57] Wasid, *Gus Dur Sang Guru Bangsa,* h. 142.

Pemahaman ini bagian dari sikap Abdurrahman Wahid dalam memakai isu-isu demokrasi. Dengan menerima demokrasi, umat Islam harus tetap memiliki semangat religiusitas yang tinggi, sekaligus menghargai lokalitas. Bukan "berteriak" dengan mengatakan bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam sebab berasal dari konsepsi Barat hingga layak ditolak sampai kapanpun sebagaimana dilakukan kalangan Islam fundamendalisme yang dengan getolnya menghendaki Islam sebagai ideologi bangsa dengan model penegakan syari'ah atau perlunya konsep khilafah Islamiyah sebagai pilihan bagi pemerintahan Islam, sementara dalam konteks praktis semmua menyadari negara yang berideologi Islam masih menuai pelbagai persoalan internal yang tidak kunjung selesai.[58]

Dengan mengetahui bahwa menciptakan kultur demokratis membutuhkan proses panjang yang tidak sekali jadi, apalagi melihat konteks sosial dan kultural bangsa yang beragram, baik suku, agama, maupun etnis. Dalam menyikapi hal ini, seringkali Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa menmbangun kultur sebuah bangsa yang demokratis adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti, tidak sekali jadi, seiring tidak pupusnya dinamika kehidupan masyarakat yang tidak pernah puas mencari hal terbaik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kondisi sosial-budaya masyaarakat yang dalam setiap periodenya berbeda, maka proses berdemokrasi harus menyeseuaikannya, meskipun tetap pada kerangka ideal

[58] *Ibid.*, h. 143.

penciptaan riil substansi berdemokrasi. Maka, demokrasi substansi sangatlah penting daripada sekedar demokrasi prosedural sebab dengannya nilai-nilai ideal demokrasi, misalnya tentang kebebasan dan keadilan, nyata terpraktekkan dalam hidup dan kehidupan.[59]

Dengan memahami bahwa demokrasi adalah proses, maka usaha keras tidak ada pilihan harus diciptakan secara serius oleh semua kalangan, termasuk membentuk semacam organisasi apapun yang berkomitmen mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Dalam salah satu tulisannya, Abdurrahman Wahid menegaskan, terkait dengan pentingnya kontinyuitas menegakkan nilai-nilai demokratis tanpa pantang menyerah berproses[60] sebagaimana berikut:

> " Penghayatan bahwa demokrasi adalah suatu proses, yaitu proses yang ajeg dan tak henti-hentinya (yaitu pengertian yang dinamis dari demokrasi). Itulah yang mendorong kita untuk mendayagunakan proses demokratisasi secara bersama melalui Forum Demokrasi."[61]

Abdurrahman Wahid dalam konteks mengaitkan Islam dan demokrasi memberikan formula pemahaman agar fungsi transformatif yang dibawakan oleh agama bagi demokratisasi kehidupan masyarakat, harus berpijak dari transformasi intern masing-masing agama. Artinya, agama, khususnya Islam, harus merumuskan kembali pandangan-pandangannya mengenai martabat manusia, kesejajaran kedudukan semua manusia di muka undang-undang dan

---

[59] *Ibid*., h. 144.
[60] *Ibid*., h. 144.
[61] Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, h. 213.

solidaritas hakiki antara semua elemen umat manusia dari berbagai suku, agama maupun etnis.[62]

Abdurrahman Wahid memahami demokrasi bukan sekedar menangkap apa yang terjadi dan telah berproses di Barat atau di Timur, tapi ia mengkombinasikan dengan kondisi kultur bangsa yang beragam serta memiliki kesepamahaman atas prinsip-prinsip ketuhanan dengan menempatkan ajaran-ajaran-Nya sebagai etika publik untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[63]

Bagi Abdurrahman Wahid menciptakan masyarakat demokratis yang di dalamnya setiap individu memiliki kebebasan adalah tugas yang tidak mudah sehingga meniscayakan adanya usaha yang tiada henti. Bagi umat Islam, sikap memandang orang lain sebagai bagian dari misii agama yang layak serta harus dipraktekkan dalam kehidupan. Bagi Abdurrahman Wahid, orang Islam harusnya memaknai agamanya secara utuh sebab langkah ini yang akan memuluskan praktek demokratisasi berjalan dengan lancar sebab terlegitimasi oleh adanya tafsiran-tafsiran agama yang progresif-humanis atau tafsiran yang tidak melupakan prinsip-prinsip kemanusiaan.[64]

Dengan demikian Islam selalu menghendaki demokrasi yang merupakan salah satu ciri atau jati diri Islam sebagai agama hukum. Maka Islam juga

---

[62] *Ibid*., h. 167.
[63] Wasid, *Gus Dur Sang Guru Bangsa*, h. 148.
[64] *Ibid*., h. 149.

harus mengembangkan keadilan sosial di samping keadilan-keadilan lainnya.[65]

4. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam dalam perspektif Abdurrahman Wahid tidak lepas dari peran pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang menjadi wahana resistensi moral dan budaya atau pewaris tradisi intelektual Islam tradisional.[66] Pendidikan Islam menurut Abdurrahman Wahid adalah sebuah proses untuk mengantarkan peserta didik agar mempunyai bekal yang cukup dan mampu berpikir kritis sepanjang hayatnya.[67]

Pendidikan Islam dalam pandangan Abdurrahman Wahid haruslah menjadi pangkalan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang kini sudah mulai lepas. Ia menjadi tumpuan langkah strategis untuk mengembalikan arus yang menggedor pintu pertahanan umat Islam. Sesuatu yang cukup vital adalah membuat sebuah kerangka pemahaman, khususnya dalam pendidikan Islam sehingga mampu menjadi inspirasi dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang sifatnya universal. Pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam pun menjadi pemahaman yang utuh dan komprehensif.[68]

Pendidikan haruslah beragam, ini merupakan salah satu dari percikan pemikiran yang pernah dilontarkan oleh sosok Abdurrahman Wahid.

---

[65] Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara, dan Demokrasi*, h. 89.
[66] Faisol, *Gus Dur dan Pendidikan Islam*, h. 7.
[67] *Ibid.*, h. 10-11.
[68] *Ibid.*, h. 25.

Pemikiran ini dilandasi bahwa Abdurrahman Wahid memahami kondisi sosial masyarakat yang majemuk di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu wujud pilihan strategi untuk mengembangkan dan menyelaraskan pendidikan Islam dalam bingkai perbedaan suku, ras, dan keyakinan yang cukup beragam di negeri ini.[69]

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid menghasilkan suatu kebudayaan serta keilmuan dalam dunia pendidikan Islam, maka pendidikan dan pembelajaran haruslah membebaskan yang memberikan ruang untuk melakukan suatu dialog atau perdebatan ilmiah, tanpa harus memisahkan dimana posisi guru dan peserta didik yang terkadang seakan murid adalah obyek untuk diisi bagai gelas kosong seperti dalam aliran empirisme yang akan membawa kepada peserta didik hanya bersikap pasif.[70]

Pendidikan berupaya untuk memberikan suatu pembebasan manusia dalam kehidupan obyektif dari penindasan. Pendidikan yang benar-benar membebaskan bisa diterapkan di dalam atau di luar sistem kehidupan sekarang dan dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati oleh mereka yang sanggup menghilangkan rasa naif serta memiliki suatu keyakinan dan komitmen untuk benar-benar membebaskan.[71]

---

[69] *Ibid.*, h. 121.
[70] Yatim Riyanto, *Paradigma Baru dalam Pembelajaran,* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 2-9.
[71] Andre'e Feillard, dkk., *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil,* (Yogyakarta: LkiS, 1997), h. 190.